



RENCANA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada tuhan yang maha kuasa, karena pada tahun 2022 ini Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Bone telah selesai menyusun Rencana Kerja Tahun 2023.

Rencana Kerja ini akan digunakan sebagai pedoman dan arahan pengelolaan Keuangan yang hendak dicapai pada priode 2018 - 2023, renstra merupakan pedoman dalam penyusunan: (1) rencana kerja(renja); (2) rencana kerja dan anggaran (RKA);(3) laporan tahunan; dan (4) laporan akutabilitas kinerja instansi pemerintah(LAKIP); (5) rencana/program Pengelolaan Keuangan daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bone.

Dalam rencana strategis (renstra) perubahan tahun 2018 -2023 ini terdapat tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu kepada tujuan dan sasaran yang ada di dalam RPJMD Kabupaten Bone yaitu *Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam pengembangan budaya politik dan penegakan hukum.*

Kami sadar bahwa didalam penyusunan rencana strategis (renstra) perubahan tahun 2018-2023 ini masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran demi tercapainya Ketentramanan dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Bone sehingga visi Kabupaten Bone adalah Masyarakat Kabupaten Bone yang MABESSA (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera).

Dan akhirnya, semoga semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 2 tahun kedepan dapat lebih terarah, berdaya guna, dan berhasil guna

Watampone, 12 Februari 2022

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Bone Police Unit (Satuan Polisi Pamong Praja). The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BONE" at the top and "SATUAN POLISI PAMONG PRAJA" at the bottom. In the center is a logo featuring a torch and a scale. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

A. AKBAR, S.Pd., M.Pd

Nip. 19691120 199503 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISIii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1. 1. Latar Belakang 1

1. 2. Landasan Hukum..... 3

1. 3. Maksud dan Tujuan 4

1. 4. Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja 10

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone 19

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 20

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 25

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN26

3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 26

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 27

3.3 Program dan Kegiatan..... 28

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH31

BAB V PENUTUP36

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun perencanaan pembangunan daerah, meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program OPD, lintas OPD, program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif ;
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

Dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan menjabarkan rencana detail teknis pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja OPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Renja OPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mempunyai kedudukan dan fungsi strategis dalam sistem perencanaan daerah karena Renja OPD merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka anggaran guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang keuangan daerah.

Renja OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Renja OPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Renstra OPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan. Renja OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)- OPD.

1. 2. Landasan Hukum

Bahwa penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone mengacu pada:

1. Undang- Undang Nomor 29 tahun 1959 tetang pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Tenrang Perubahan kedua atas Undang- Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012 -2032 (Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2)
10. Peraturan daerah kabupaten Bone Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005- 2025 (Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 nomor 3)
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 9)
 13. Peraturan Bupati bone nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 55)
 14. Peraturan Bupati Bone nomor 87, Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Persaturan Bupati Bone Nomor 31 Tahun Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Bone Tahun 2020 (Berita Daerah kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 31)

1. 3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone adalah merupakan dokumen tahunan yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018-2023 dan untuk mewujudkan sinergis antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, dengan OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.

Dalam mencapai maksud diatas, tujuan penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone, meliputi:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra
- b. Mengidentifkasi kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. Mengindentifikasi permasalahan dan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja 1 (satu) tahun mendatang.
- d. Menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja dan target pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja selama 1 (satu) tahun mendatang.
- e. Menetapkan rencana program dan kegiatan pembangunan yang disertai pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun mendatang.
- f. Menetapkan rencana kerja dan pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja selama 1 (satu) tahun mendatang.

1. 4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, dan mengemukakan capaian-capaian pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra periode sebelumnya.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan hasil penelaah kebijakan nasional dan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran beserta indikatornya, serta perumusan program dan kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan hasil perumusan program dan kegiatan beserta pendanaannya untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD merupakan kegiatan yang bersifat regular dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone dalam menyusun program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone. Memperhatikan ketentuan tersebut, nampak bahwa Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan secara tidak langsung juga mendukung capaian kinerja 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone yang merupakan representasi dari Misi ke 6 (enam) *“Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat”* dengan program strategis pemerintah daerah yaitu: *Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan*, yang akan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan sebagaimana

yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 yaitu:

Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021

NO	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	IDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome/ Kegiatan (Output)	Target Restra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/5x100%		10
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Rata - Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknik Perangkat Daerah	21.877	44.938.316.108	1.778	14.175.535.353	2.477	6.761.981.147	2.477	6.761.981.147	11,32	15,05	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1		Perencanaan,Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Realisasi Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Setiap Tahun Anggaran	6	17,086,861	2	6.361.300	2	6.361.300	2	6.361.300	33,33	37,23	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan (Dokumen)	6	17,086,861	2	6.361.300	2	6.361.300	2	6.361.300	33,33	37,23	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Setiap Tahun Anggaran	42	24,566,588,770	14	8.067.901.453	14	6.336.207.747	14	6.336.207.747	33,33	25,79	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima Gaji setahun Anggaran (Bulan)	42	24,566,588,770	14	8.067.901.453	14	6.336.207.747	14	6.336.207.747	33,33	25,79	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Aparatur Pembina Yang Bersertifikat	12	136,697,500	6	60.261.000	6	62.311.000	6	62.311.000	50	45,58	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		- Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (Orang)	12	136,697,500	6	60.261.000	6	62.311.000	6	62.311.000	50	45,58	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor Berbasis IT Setiap Tahun Anggaran	3.248	589.993.377	1.247	242.963.600	1.247	200.067.700	1.247	200.067.700	38,39	33,91	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)	36	109,432,477	12	30.470.200	12	50.311.600	12	50.311.600	33,33	45,98	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Pengandaan (Lembar)	3.100	42,972,900	1.200	16.985.400	1.200	16.985.400	1.200	16.985.400	38,71	39,53	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan (Buah)	22	12,300,000	5	6.000.000	5	6.000.000	5	6.000.000	22,73	48,78	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi (Kali)	90	425,288,000	30	189.508.000	30	126.770.700	30	126.770.700	33,33	29,81	SATUAN POLISI PAMONG

NO	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	IDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome/ Kegiatan (Output)	Target Restra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														PRAJA
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Realisasi Jasa Penyediaan dan Pelayanan Kantor Setiap Tahun Anggaran	18.552	19.163.640.000	506	5.664.000.000	1.205	22.985.400	1.205	22.985.400	6,49	0,12	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia (Bulan)	36	36.000,000	12	12.000.000	1.200	16.985.400	1.200	16.985.400	3,33	47,18	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor (Orang)	18.516	19,127,640,000	494	5.652.000.000	5	6.000.000	5	6.000.000	0,02	0,03	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Realisasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	17	464,309,600	3	134.048.000	3	134.048.000	3	134.048.000	17,65	28,87	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang memperoleh jasa pemeliharaan (Unit)	17	464,309,600	3	134.048.000	3	134.048.000	3	134.048.000	17,65	28,87	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTTIBAN UMUM		274	6.853.076.760	261	948.966.000	158	2.153.044.000	158	2.153.044.000	57,66	31,42	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalm 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota		274	6.853.076.760	261	948.966.000	158	2.153.044.000	158	2.153.044.000	57,66	31,42	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		- Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan (Persen)	6	993,000,000	50	300.000.000	2	220.656.400	2	220.656.400	33,33	22,22	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		- Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusushan Massa	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan trantibun dalam Kab/Kota yang ditangani (Persen)	150	159,352,980	50	4.200.000	50	51.660.000	50	51.660.000	33,33	32,42	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa HAK Asasi Manusia	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM (Orang)	6	71,998,730	50	60.320.000	2	60.310.000	2	60.310.000	33,33	83,76	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		- Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah lembaga dan kemitraan yang dikerjasamakan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	12	5,599,990,000	11	568.018.000	4	1.815.417.600	4	1.815.417.600	33,33	32,42	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		- Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Warga yang menerima Kompensasi terhadap Dampak Penegakan Perda dan Perkada (Persen)	100	28,735,050	100	16.428.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	17,40	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		- Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota												SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Peserta Sosialisasi Penegakan Perda dan Perbup/Perkada (Orang)											SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Wilayah Kabupaten Bone yang luas dimana terdiri dari 27 Kecamatan serta Sumber Daya Alam dan kondisi Demografis penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan menimbulkan gangguan Ketentraman dan Ketertiban.

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Bone, Satuan Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motifator.

1) Faktor Internal :

- a. Masih perlunya peningkatan kualitas personil
- b. Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana.
- c. Masih belum terpenuhinya Satuan Perlindungan Masyarakat
- d. Masih perlunya penambahan Anggaran.

2) Faktor Eksternal :

- a. Masih banyaknya penyimpangan Pelanggaran Peraturan Daerah.
- b. Jumlah Kasus Kriminalitas dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Sering terjadinya Unjuk rasa dan persengketaan
- d. Bencana kebakaran dan banjir yang terjadi dan tidak bisa diprediksikan
- e. Masih banyaknya masyarakat yang belum mempunyai IMB
- f. Maraknya jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis
- g. Meningkatnya jumlah PKL di pinggir jalan

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Bone Tahun 2020 (Indikator Lama)

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah rekening internet yang terbayar			12 Rekening	12 Rekening	12 Rekening	12 Rekening	12 Rekening	12 Rekening	12 Rekening	12 Rekening	
	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun (kali)			60 Kali	60 Kali	60 Kali	60 Kali	60 Kali	60 Kali	60 Kali	60 Kali	
	Jumlah Tenaga Kebersihan yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun (kali)			12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	
	Jumlah pembayaran Media yang Menyediakan bahan bacaan (Kali)			12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	
	Jumlah Kegiatan rutin koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tupoksi organisasi ketingkat nasional,tingkat provinsi dan tingkat kabupaten yang diikuti (Kegiatan)			30 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	
	Jumlah Pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran (Paket)			60 Paket	60 Paket	60 Paket	60 Paket	60 Paket	60 Paket	60 Paket	60 Paket	

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				Realisasi Capaian	Proyeksi				Catatan Analisis
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Persentase realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur (persen)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	jumlah pengadaan kendaraan dinas operasioanl (unit)			2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit		
	Jumlah Pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran (Paket)			5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket		
	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor (Paket)			5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket		
	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional (Paket)			10 Paket	12 Paket	14 Paket	16 Paket	10 Paket	12 Paket	14 Paket	16 Paket		
	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor (Paket)			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		
3	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (Persen)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Orang)			1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	2 Orang	1 Orang	1 Orang		
	Jumlah Peserta Sosialisasi (orang)			300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang		
	Jumlah Bimbingan Teknis (Kegiatan)			5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan		

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				Realisasi Capaian	Proyeksi				Catatan Analisis
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	Persentase realisasi penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang tersusun (Dokumen)			5 Dokumen	7 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen		
	jumlah laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran yang tersusun			17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen		
	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Dokumen)			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
5	Persentase realisasi penyusunan pelaporan pemerintahan umum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang tersusun			6 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen		
6	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (persen)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Jumlah Jasa tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan (Kali)			5.028 Kali	5.028 Kali	5.028 Kali	5.028 Kali	5.028 Kali	5.028 Kali	5.028 Kali	5.028 Kali		

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	jumlah pos jaga / ronda yang terbangun (unit)			5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	
	jumlah pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan (Kegiatan)			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	Jumlah patroli per hari (kali)			1.080 Kali	1.080 Kali	1.080 Kali	1.080 Kali	1.080 Kali	1.080 Kali	1.080 Kali	1.080 Kali	
	jumlah peserta yang mengikuti peringatan HUT Polpp (Kegiatan)			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-	
	Jumlah rokok ilegal			70	70	60	60	70	70	60	-	
7	Persentase Penegakan PERDA (persen)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah pendukung pengawasan dan pengendalian kegiatan Satpolpp (paket)			5.028 Paket	5.028 Paket	5.028 Paket	5.028 Paket	5.028 Paket	5.028 Paket	5.028 Paket	5.028 Paket	
	Jumlah tenaga pendukung pencegahan tindak kejahatan (orang)			12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	
	Jumlah peserta sosialisasi Pemberantasan Pajak/Cukai Rokok ilegal (orang)			300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	
8	Persentase Petugas Perlindungan Masyarakat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat yang terbentuk(Kegiatan)			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				Realisasi Capaian	Proyeksi				Catatan Analisis
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Jumlah kegiatan pengadaan pakaian linmas (Kegiatan)			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
	Jumlah kegiatan Peserta pelatihan dan pembinaan linmas (Kegiatan)			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
9	Persentase Penegakan PERDA			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat (orang)			300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang		
	Jumlah kegiatan titik rawan pekat yang ditertibkan (Kegiatan)			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Bone Tahun 2021 (Indikator Baru)

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA		REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
	Persentase Capaian Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
1	Persentase Penganggaran Evaluasi Kerja Daerah yang diadakan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	-	3 Dokumen	-	-	3 Dokumen	
2	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan beserta tambahan penghasilan bulanan bagi ASN	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	
	Jumlah koordinasi penyusunan laporan keuangan	4 Kali	4 Kali	-	4 Kali	4 Kali	
3	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	2 Orang	4 Orang	6 Orang	2 Orang	4 Orang	
4	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
	Jumlah pengadaan komponen listrik	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	
	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	Jumlah Penyediaan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA		REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
	Jumlah jenis Barang cetakan dan penggandaan	900 Lembar	1.000 Lembar	1.200 Lembar	900 Lembar	1.000 Lembar	
	Jumlah bahan bacaan	7 Tabloid/Koran	10 Tabloid/Koran	5 Tabloid/Koran	7 Tabloid/Koran	10 Tabloid/Koran	
	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Kali	40 Kali	30 Kali	20 Kali	40 Kali	
5	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	1 Unit	-	-	1 Unit	-	
	Jumlah Mebel yang diadakan	8 Unit	15 Unit	-	8 Unit	15 Unit	
	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Unit	10 Unit	-	7 Unit	10 Unit	
6	Persentase Jasa Penunjang Daerah yang diadakan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.192 Orang	6.192 Orang	6.132 Orang	6.192 Orang	6.192 Orang	
7	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang yang diadakan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
	Jumlah kendaraan dinas operasional yang memperoleh jasa pemeliharaan	7 Unit	7 Unit	3 Unit	7 Unit	7 Unit	
	Jumlah Pengadaaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11 Unit	11 Unit	-	11 Unit	11 Unit	
	Jumlah gedung yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	
	Persentase Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Perda dan Perkada	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
8	Persentase Pelanggaran Perda yang ditangani dan diselesaikan serta	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA		REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
	Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan						
	Jumlah Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	50 Kasus	50 Kasus	50 Kasus	50 Kasus	50 Kasus	
	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 Kegiatan	12 Kegiatan	-	12 Kegiatan	12 Kegiatan	
	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	110 Orang	110 Orang	-	110 Orang	110 Orang	
	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	
	Jumlah lembaga dan kemitraan yang dikerjasamakan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	
	Jumlah sarana dan prasarana minimal yang dipenuhi	7 Unit	11 Unit	-	7 Unit	11 Unit	
	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	6 SOP	1 SOP	-	6 SOP	1 SOP	
	Persentase Jumlah Warga yang menerima Kompensasi terhadap Dampak Penegakan Perda dan Perkada	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
9	Persentase Pelanggaran Perda yang ditangani dan diselesaikan serta Jumlah Perda dan Perbup yang diawasi dan ditangani	100 Persen	100 Persen	0 Persen	100 Persen	100 Persen	
	Jumlah Peserta Sosialisasi Penegakan Perda dan Perbup/Perkada	500 Orang	510 Orang	-	500 Orang	510 Orang	
	Jumlah Pengawasan Peraturan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	
	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	5 Perda/Perkada	5 Perda/Perkada	-	5 Perda/Perkada	5 Perda/Perkada	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone

Meski keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja telah beberapa kali mengalami perubahan baik struktur organisasi maupun Nomenklatur, yang kemungkinan di kemudian hari masih berpeluang untuk berubah, namun secara substansi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja tidak mengalami perubahan yang berarti.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, Tugas Pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas pokok penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

b. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan kerjasama antar Instansi, lembaga pemerintah dan non pemerintah;
- 6) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- 7) Pelaksanaan koordinasi intelejen daerah;
- 8) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- 9) Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone, telah di rumuskan sasaran sesuai dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan dan mendukung visi dan misi bupati sebagai berikut :

- 1) Menurunnya kasus pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan);
- 2) Menurunnya jumlah kasus pelanggaran Perda;
- 3) Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan;
- 4) Menurunnya kasus penyakit masyarakat;
- 5) Menurunnya kasus kriminalitas.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, misalnya rumusan program dan kegiatan baru yang terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan sudah sesuai namun besarnya berbeda. Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA				13,132,255,400	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA				13,132,255,400	
1	Perencanaan,Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15,158,690	Perencanaan,Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15,158,690	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	14,708,690	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	14,708,690	
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	450,000	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	450,000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6,481,805,840	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6,481,805,840	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	6,469,943,840	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	6,469,943,840	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	4 Laporan	11,862,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	4 Laporan	11,862,000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				11,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				11,000,000	
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	11,000,000	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	11,000,000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				232,496,670	Administrasi Umum Perangkat Daerah				232,496,670	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	735,000	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	735,000	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	16,294,370	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	16,294,370	
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	374,300	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	374,300	
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12,375,000	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12,375,000	
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediaka	5 Dokumen	6,000,000	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediaka	5 Dokumen	6,000,000	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	196,718,000	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	196,718,000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				31,284,200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				31,284,200	
	- Pengadaan Mebel	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediaka	15 Unit	14,384,200	- Pengadaan Mebel	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediaka	15 Unit	14,384,200	
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	16,900,000	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	16,900,000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6,149,400,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6,149,400,000J	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20,400,000	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20,400,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6,129,000,000	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6,129,000,000	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				337,688,400	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				337,688,400	
7	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				331,838,400	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				331,838,400	
	- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2 Kasus	300,000,000	- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2 Kasus	300,000,000	
	- Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	50 Kasus	10,500,000	- Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	50 Kasus	10,500,000	
	- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1,950,000	- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1,950,000	
	- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	1,950,000	- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	1,950,000	
	- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang	2,100,000	- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang	2,100,000	
	- Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 Dokumen	1,950,000	- Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 Dokumen	1,950,000	
	- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	10 Unit	12,788,400	- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	10 Unit	12,788,400	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
-	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	100 Laporan	600,000	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	100 Laporan	600,000	
8	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				5,850,000	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				5,850,000	
-	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	4 Laporan	1,950,000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	4 Laporan	1,950,000	
-	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4 Laporan	1,950,000	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4 Laporan	1,950,000	
-	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	4 Laporan	1,950,000	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	4 Laporan	1,950,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 71 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone, maka Satuan Polisi Pamong Praja untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2023 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas.

Namun demikian terkait dengan usulan alokasi dana untuk Satuan Polisi Pamong Praja mengalokasikan anggaran dalam belanja Belanja transfer berdasar rekomendasi di OPD yang sesuai kewenangannya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone adalah ujung tombak pemerintah Kabupaten Bone dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Perda haruslah didukung oleh seluruh instansi terkait, lembaga-lembaga hukum, dan masyarakat.

Adapun permasalahan pada pelaksanaan tugas dan fungsi terkait Tujuan dan Sasaran serta indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya ruang terbuka hijau (RTH), tata ruang pemukiman yang kurang tepat, pemanfaatan fungsi lahan yang salah, rumah tanpa pekarangan;
2. Masih adanya kelompok masyarakat yang belum tersentuh sosialisasi, pembinaan dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati;
3. Masih lambatnya respon aparat ketika terjadi pelanggaran Perda karena terkendala oleh masalah teknis seperti jarak tempuh ke lokasi;
4. Kurangnya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan Peraturan Daerah;
5. Kurangnya tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku;
6. Masih kurangnya kerjasama antara masyarakat dan lembaga pemerintah dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan;
7. Belum adanya anggota Satpol PP yang bertugas khusus di kecamatan;
8. Masih kurangnya kontrol pemerintah dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
9. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan.

“Masih kurangnya ruang terbuka hijau (RTH), tata ruang pemukiman yang kurang tepat, pemanfaatan fungsi lahan yang salah, rumah tanpa pekarangan” adalah permasalahan yang sebenarnya bukan urusan wajib Satuan Polisi Pamong Praja tetapi lebih mengarah pada tujuan dan sasaran terkait Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3).

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu

1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai ke depan dengan lebih mempertajam focus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktifitas/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Bone, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone menetapkan tujuan sebagai berikut:

a. Tujuan I :

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan

b. Tujuan II :

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan
- 2) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan

3.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur sehingga dapat dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan dari tujuan yang ditetapkan. Fokus utama dalam penetapan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan organisasi.

Adapun sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone sesuai dengan Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

a. Sasaran dari Tujuan I :

- 1) Menurunnya kasus pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan)
- 2) Menurunnya jumlah kasus pelanggaran Perda

b. Sasaran dari Tujuan II :

- 6) Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan
- 7) Menurunnya kasus penyakit masyarakat
- 8) Menurunnya kasus kriminalitas

Tabel. 3.2
Matrix Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai sakip oleh APIP	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Bone	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penegakan peraturan daerah	Menurunnya kasus pelanggaran K3 (ketertiban,kebersihan,dan keindahan)	Persentase pelanggaran K3 yang diselesaikan	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada
		Menurunnya kasus pelanggaran Perda	Persentase kasus pelanggaran Perda yang ditangani dan diselesaikan		
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	Meningkatnya masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga ketertiban	Cakupan petugas perlindungan masyarakat		
4	Meningkatnya peran masyarakat dalam penegakan penyakit masyarakat	Menurunnya kasus penyakit masyarakat	Persentase penurunan kasus penyakit masyarakat		
		Menurunnya kasus kriminilitas	Angka kriminilitas Persentase angka kriminilitas yang tertangani		

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone dalam menyusun program dan kegiatan, meliputi :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Pengadaan Mebel
 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan
 2. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
 5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
 6. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 7. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
 8. Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
-
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota
 1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 2. Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 3. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kebijakan umum sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019 berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih yang selanjutnya ditentukan program pembangunan daerah dan ditetapkan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan atas pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam rangka mencapai visi jangka menengah Kabupaten Bone. Rencana kerja dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan unit kerja. Secara keseluruhan rencana kerja dan alokasi anggaran untuk program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone pada Tahun Anggaran 2023 mengajukan usulan anggaran sebesar Rp. 13.469.943.800,- terdiri dari:

- 1. Belanja Operasi, sebesar Rp. 13.442.771.200,- Atau sebesar 99,80% Dari Total Rencana Anggaran Tahun 2023, dipergunakan untuk belanja gaji dan tunjangan PNS Satuan Polisi Pamong Praja, tunjangan daerah dan iuran Askes PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
- 2. Belanja Modal sebesar Rp. 27.172.600 Atau Sebesar 0,20% Dari Total Rencana Anggaran Tahun 2023,-

Tabel.4.1
Rencana Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023

NO	URAIAN	RENCANA (Rp)	%
1	Belanja Operasi	13.442.771.200	99,80
2	Belanja Modal	27.172.600	0,20
	JUMLAH	13.469.943.800	100

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2023 dan Prakiraan Maju

NO	RENCANA TAHUN 2023									TARGET TAHUNAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)						
					BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	JUMLAH		
	BIDANG SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA				13,132,255,400						16,857,018,674
1		Perencanaan,Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15,158,690						12,245,696
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	14,708,690					100 Persen	6,179,966
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	450,000					100 Persen	6,065,730
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6,481,805,840						9,512,452,594
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	6,469,943,840					100 Persen	9,506,386,501
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	11,862,000					100 Persen	6,066,093
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			11,000,000						42,743,250
			Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	11,000,000					100 Persen	42,743,250
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah			232,496,670						213,261,374

NO	RENCANA TAHUN 2023									TARGET TAHUNAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)						
					BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	JUMLAH		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	735,000					100 Persen	1,440,505
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	16,294,370					100 Persen	45,490,397
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	374,300					100 Persen	348,722
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	12,375,000					100 Persen	14,973,750
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	6,000,000					100 Persen	3,630,000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	196,718,000					100 Persen	147,378,000
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			31,284,200						49,435,760
			Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	14,384,200					100 Persen	13,135,760
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	16,900,000					100 Persen	36,300,000
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6,149,400,000						6,850,580,000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	20,400,000					100 Persen	13,200,000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	6,129,000,000					100 Persen	6,837,380,000
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			211,110,000						176,300,000



NO	RENCANA TAHUN 2023									TARGET TAHUNAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)						
					BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	JUMLAH		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	196,510,000					100 Persen	165,000,000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1,300,000					100 Persen	6,050,000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	13,300,000					100 Persen	5,250,000
	BIDANG ANGGARAN										
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			337,688,400						652,614,418
8		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			331,838,400						608,582,518
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Pajak Rokok	300,000,000					100 Persen	399,300,000
			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	10,500,000					100 Persen	65,163,098
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1,950,000					100 Persen	106,892,610
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1,950,000					100 Persen	7,316,023



NO	RENCANA TAHUN 2023									TARGET TAHUNAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)						
					BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	JUMLAH		
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	2,100,000					100 Persen	6,729,173
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1,950,000					100 Persen	11,000,000
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	12,788,400					100 Persen	5,090,409
			Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	600,000					100 Persen	7,091,205
	BIDANG PERBENDAHARAAN										
9		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			5,850,000						44,031,900
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1,950,000					100 Persen	17,165,42
			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1,950,000					100 Persen	6,844,607
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1,950,000					100 Persen	20,021,870

BAB V

PENUTUP

A. Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, Penegakan Perda, Peraturan dan Keputusan Bupati serta terciptanya ketentraman dan kenyamanan di masyarakat. Rencana Kerja ini merupakan pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone Tahun 2023.

Pelaksanaan Rencana Kerja ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan program kerja sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Sejalan dengan hal tersebut diatas kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program kegiatan dan sub. Kegiatan tersebut masih mengalami hambatan Karena adanya Pandemi Covid – 19 .

B. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub. Kegiatan berdasarkan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD yang telah disahkan .

C. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut program kegiatan dan sub. kegiatan Perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone pada tahun 2023 menetapkan 2 Program, 18 Kegiatan dan 29 Sub. Kegiatan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023 merupakan menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah tahun ketiga RPJMD dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2018-2023 ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur, yang selanjutnya akan dikompilasikan di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bone

Dengan penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan semua pihak memiliki satu persepsi tentang Rencana Kerja sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal.

Watampone, 10 Februari 2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bone



A. AKBAR, S.Pd., M.Pd.

Nip. 19691120 199503 1 004

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								13,469,943,800				17,509,633,092	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								13,132,255,400				16,857,018,674	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								15,158,690				12,245,696	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penganggaran Evaluasi Kerja Daerah yang diadakan	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Dokumen	100 Persen	14,708,690	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	6,179,966
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penganggaran Evaluasi Kerja Daerah yang diadakan	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Laporan	100 Persen	450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	6,065,730
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6,481,805,840				9,512,452,594	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase rata - rata capaian kinerja indikator program	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	14 Orang/bulan	100 Persen	6,469,943,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	9,506,386,501
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase rata - rata capaian kinerja indikator program	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Laporan	100 Persen	11,862,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	6,066,093
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								11,000,000				42,743,250	
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Orang	100 Persen	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	42,743,250
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								232,496,670				213,261,374	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Paket	100 Persen	735,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	1,440,505
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Paket	100 Persen	16,294,370	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	45,490,397
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Paket	100 Persen	374,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	348,722

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Paket	100 Persen	12,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	14,973,750
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Dokumen	100 Persen	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	3,630,000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	196,718,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	147,378,000
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								31,284,200	49,435,760				
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	15 Unit	100 Persen	14,384,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	13,135,760
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Unit	100 Persen	16,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	36,300,000
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								6,149,400,000	6,850,580,000				
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase jasa penunjang daerah yang diadakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	20,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	13,200,000
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase jasa penunjang daerah yang diadakan	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	6,129,000,000	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	6,837,380,000
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								211,110,000	176,300,000				
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase barang milik daerah penunjang yang diadakan	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	7 Unit	100 Persen	196,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	165,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bone

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah penunjang yang diadakan	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	11 Unit	100 Persen	1,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	6,050,000	
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase barang milik daerah penunjang yang diadakan	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	100 Persen	13,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	5,250,000	
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								337,688,400	652,614,418					
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								331,838,400	608,582,518					
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (%)	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Kasus	100 Persen	300,000,000	Pajak Rokok		Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada	100 Persen	399,300,000	
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (%)	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	50 Kasus	100 Persen	10,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada	100 Persen	65,163,098	
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (%)	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	1,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada	100 Persen	106,892,610	
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (%)	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Dokumen	100 Persen	1,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada	100 Persen	7,316,023	
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (%)	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Orang	100 Persen	2,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada	100 Persen	6,729,173	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bone

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	02	2.01	06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (%)	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Dokumen	100 Persen	1,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada	100 Persen	11,000,000
1	05	02	2.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (%)	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Unit	100 Persen	12,788,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada	100 Persen	5,090,409
1	05	02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (%)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Laporan	100 Persen	600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada	100 Persen	7,091,205
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota								5,850,000				44,031,900	
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Persentase pelanggaran perda yang ditangani dan diselesaikan serta jumlah perda dan perbub yang diawasi dan ditangani	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Laporan	100 Persen	1,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada	100 Persen	17,165,423
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelanggaran perda yang ditangani dan diselesaikan serta jumlah perda dan perbub yang diawasi dan ditangani	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Laporan	100 Persen	1,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada	100 Persen	6,844,607
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Persentase pelanggaran perda yang ditangani dan diselesaikan serta jumlah perda dan perbub yang diawasi dan ditangani	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Laporan	100 Persen	1,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada	100 Persen	20,021,870
TOTAL													13,469,943,800				17,509,633,092	